

BAB I

PENDAHULUAN

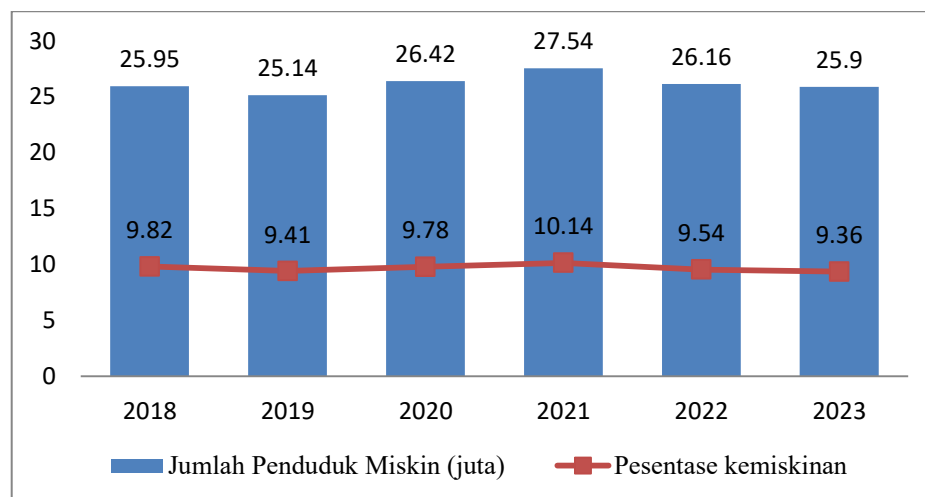
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Angka kemiskinan yang tinggi mencerminkan masih rendahnya kesejahteraan penduduk. Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan upaya pengentasan kemiskinan merupakan agenda nasional. Keynes (1936) melihat kemiskinan sebagai masalah struktural akibat faktor seperti pengangguran, inflasi, dan ketidakmerataan pendapatan (Faqih et al., 2024). Sedangkan, teori kapabilitas oleh Amartya Sen (1976) mengungkapkan jika kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan pendapatan tetapi juga dari berbagai dimensi kesejahteraan. Kondisi miskin akan menyebabkan seseorang memiliki produktivitas yang rendah terjebak dalam siklus yang berulang. Kondisi tersebut dapat dijelaskan oleh teori lingkaran kemiskinan dari Ragnar Nurkse, yang menjelaskan jika lingkaran setan kemiskinan terjadi karena kurangnya permodalan, serta keterbelakangan sumber daya manusia yang menyebabkan produktivitas masyarakat rendah, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima rendah dan akan berdampak pada kemiskinan karena tidak mampu mencukupi kebutuhan (Linggawati & Wenagama, 2022).

Saat ini dalam ekonomi pembangunan menyadari bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak hanya menjadi akibat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, tetapi juga bisa menjadi penyebabnya. Artinya, kemiskinan yang sangat besar bisa menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Todaro &

Smith, 2020). Dalam mengurangi kemiskinan, analisis tentang akar kemiskinan seperti ketidaksetaraan ekonomi-sosial, kesempatan kerja yang terbatas, kurangnya akses kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk dianalisis agar dapat hasil yang komprehensif (J. Zhang et al., 2024).

Pengentasan kemiskinan juga tercantum dalam tujuan pertama *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau program pembangunan berkelanjutan adalah agenda pembangunan global yang disepakati dan ditetapkan pada September 2015 dan ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan SDGs adalah pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam agenda 1, Tanpa Kemiskinan. Dalam Metadata Pilar Pembangunan Sosial yang dipublikasi oleh Bappenas (2020) salah satu target tanpa kemiskinan adalah mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional pada tahun 2030.



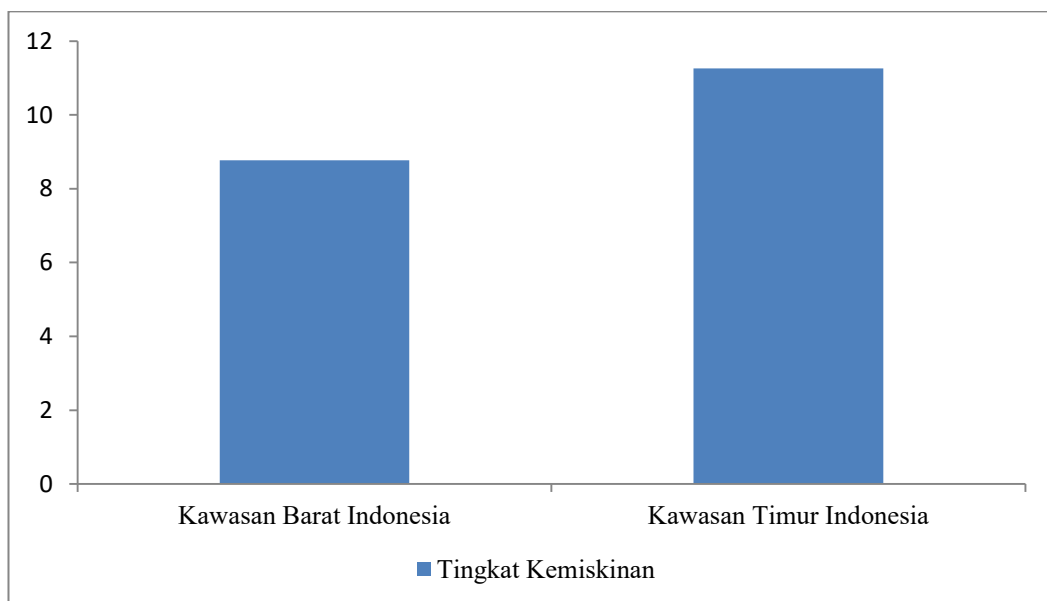
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2018-2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 (juta) jiwa pada semester satu tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia cukup besar. Meskipun angkanya menunjukkan adanya penurunan sebesar 5% sejak tahun 2018 yang berjumlah 25,95 (juta) jiwa. Namun, jika dihitung dalam satuan persentase penduduk miskin, maka penurunan kemiskinan hanya terjadi sebesar 0,46 % sejak tahun 2018 sebesar 9,82% menjadi 9,36% di tahun 2023. Artinya, dengan penggunaan perhitungan standar pemerintah yaitu pada garis kemiskinan penurunannya masih belum signifikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana wilayahnya tersebar dari pulau Sabang hingga Merauke. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah kepulauan tidak merata. Kesenjangan antar pulau kerap terjadi, seperti dalam kesenjangan pembangunan dan penyediaan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan antara pulau utama dengan pulau-pulau kecil dan terpencil. Tidak tersedianya konektivitas yang memadai antar pulau dapat menjadi penyebab kesenjangan pembangunan (Puspitawati, 2020). Secara historis, dahulu kepulauan yang berada di nusantara disebut dengan *Sunda Islands* (kepulauan sunda). Pada saat itu Portugis dan Belanda membagi wilayah nusantara menjadi dua kepulauan, yaitu kepulauan sunda besar dan kepulauan sunda kecil. Sunda besar mencakup pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan sunda kecil meliputi pulau Bali, Nusa Tenggara, dan lain-lain yang ukurannya lebih kecil (Pangestuti & Ningsih, 2024). Berdasarkan Peraturan

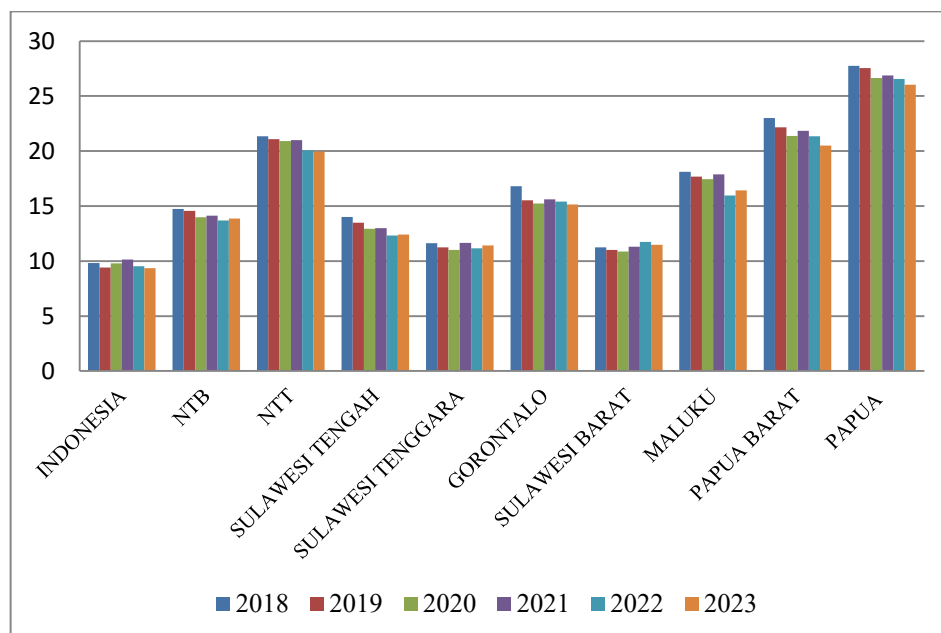
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, wilayah Indonesia dibagi menjadi dua kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kawasan barat mencakup pulau Sumatra, Jawa, dan Bali. Sedangkan kawasan timur mencakup Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Perbedaan dua kawasan tersebut seringkali mendapat sorotan. Pembangunan di Kawasan Barat Indonesia seringkali lebih maju dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia. Hal itu dapat dikarenakan Kawasan Barat Indonesia menjadi pusat perekonomian salah satunya adalah pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki perkembangan yang cukup pesat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kawasan luar pulau Jawa memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan Kawasan Barat dan Timur Indonesia Tahun 2023 (Persen)

Pada Tahun 2023 rata-rata tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia adalah 11,26% angka tersebut lebih tinggi dibandingkan di Kawasan Barat Indonesia yang memiliki rata-rata sebesar 8,77%. Di Kawasan Timur Indonesia terdapat 9 provinsi yang tingkat kemiskinannya berada diatas tingkat kemiskinan nasional, diantaranya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dari data tersebut juga menggambarkan jika masalah kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia lebih besar dan perlu fokus untuk diupayakan penanggulangannya. Jika kesenjangan kondisi perekonomian terutama dalam segi angka kemiskinan di kedua kawasan tersebut dibiarkan maka dapat menimbulkan kesenjangan wilayah yang cukup besar.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1. 3 Tingkat Kemiskinan Indonesia dan 9 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)

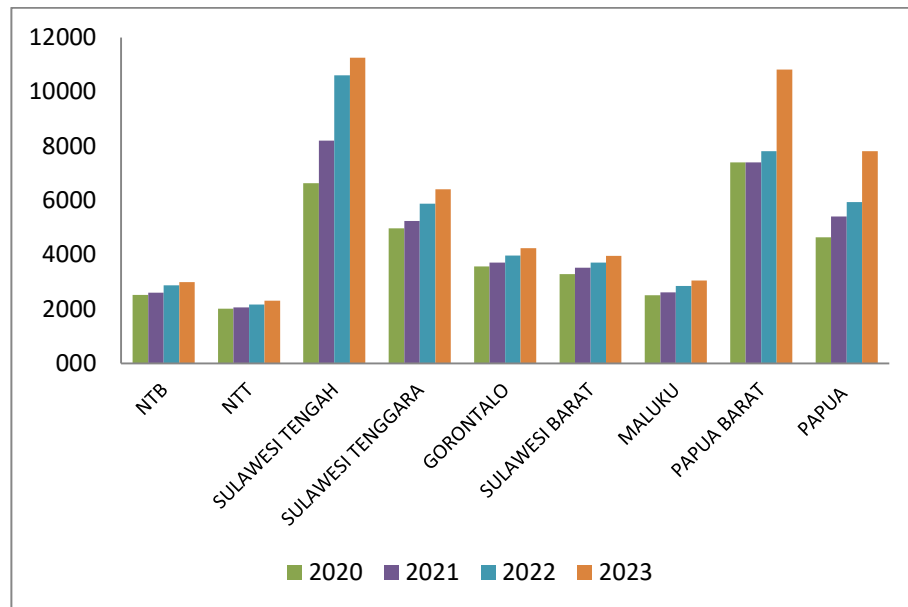
Pada gambar 1.3 menampilkan sembilan provinsi Kawasan Timur Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan di atas kemiskinan nasional sejak tahun 2018-2023. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Papua dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,03% pada tahun 2023. Diikuti dengan Provinsi Papua Barat yang memiliki tingkat kemiskinan sebanyak 20,49%. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan terendah diantara 9 provinsi lainnya yaitu sebesar 11,43% pada tahun 2023. Secara keseluruhan pergerakan persentase kemiskinan menunjukkan adanya penurunan sejak 2018-2023 meskipun angkanya tidak signifikan dan masih berada di atas kemiskinan nasional yang sebesar 9,36% pada tahun 2023. Kawasan Timur Indonesia, termasuk didalamnya kesembilan provinsi tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut dapat berupa sektor pariwisata, pertambangan, dan sumber daya laut atau ekonomi biru. Raja Ampat, Papua Barat memiliki potensi pariwisata dan sumber daya laut yang memiliki keanekaragaman biota laut. Jika dapat dimanfaatkan dengan baik maka seharusnya dapat menjadi nilai tambah daerah dan masyarakat.

Masalah kemiskinan jika dibiarkan akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat suatu negara. Kemiskinan yang terjadi secara jangka panjang akan menciptakan lingkaran setan. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang memiliki pendapatan rendah kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan yang layak sehingga peluang untuk bersaing dan mendapat pekerjaan yang layak menjadi terbatas. Akibatnya besar kemungkinan akan mengalami kemiskinan juga. Ketika siklus tersebut terjadi secara berulang

maka akan menjadi jebakan dalam lingkaran setan. Sehingga banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi antara pemilik pendapatan yang tinggi dan rendah. Masalah sosial yang ditimbulkan seperti meningkatnya kriminalitas karena desakan ekonomi dan kecemburuan antar kelompok sosial. Wilayah yang memiliki angka kemiskinan tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat. Masyarakat miskin memiliki daya beli yang rendah sehingga menghambat aktivitas ekonomi.

BPS mengukur kemiskinan dari segi ekonomi, penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah rata-rata maka dikatakan miskin. Hal itu membuat terdapat hubungan erat antara pendapatan dan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi bisa karena meningkatnya ketimpangan dan menurunnya pendapatan perkapita (Gammel, 1992: 212). Teori lingkaran setan kemiskinan juga menjelaskan kemiskinan dapat terus terjadi secara berulang dari pendapatan yang rendah sehingga menjadikan seseorang sulit untuk mencapai pembentukan modal pada gilirannya akan mengalami produktivitas yang rendah. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara atau wilayah maka seharusnya semakin rendah tingkat kemiskinan. Begitu juga sebaliknya jika pendapatan perkapita mengalami penurunan maka kemiskinan akan semakin tinggi. Dengan pendapatan yang lebih tinggi maka masyarakat dapat memiliki kemampuan dan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Peningkatan pendapatan per kapita juga dapat memberi peluang ekonomi karena pendapatan per kapita yang tinggi seringkali kali

diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga dapat banyak menciptakan lapangan pekerjaan, peluang usaha, dan investasi.



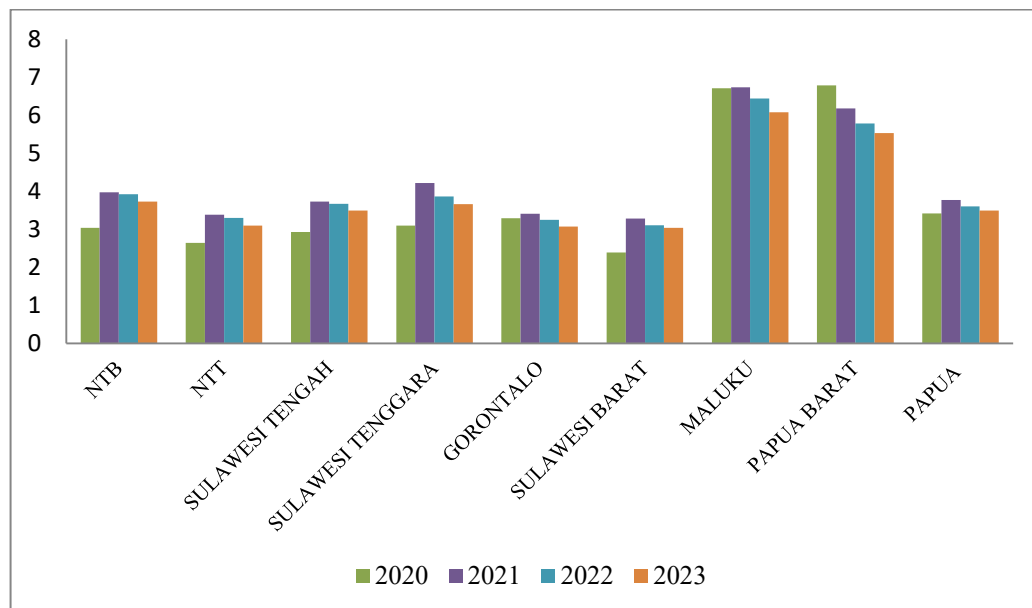
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1. 4 PDRB Per Kapita 9 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2023 (Ribuan Rupiah)

Peningkatan pendapatan per kapita dapat menggambarkan pembangunan ekonomi (Pangestuty & Prasetyia, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) PDRB per kapita sembilan provinsi di KTI secara keseluruhan terus mengalami peningkatan yang cukup baik sejak empat tahun terakhir. Termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan peningkatan yang pesat pada tahun 2023 sejak sebelumnya mengalami penurunan. Tahun 2023 PDRB Per Kapita Provinsi Papua adalah Rp 78,061,000. Provinsi dengan PDRB Perkapita tertinggi pada tahun 2023 adalah Sulawesi Tengah yaitu sebesar Rp 112,461,000. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hanya sebesar Rp 23,078,000. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kekurangan

dalam segi pendapatan. Namun, berdasarkan data menunjukkan pendapatan masyarakat terus mengalami peningkatan yang baik dan seharusnya kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi maka berpeluang lebih besar dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya dibandingkan dengan yang berpendapatan rendah (A. Fitriana & Gravitiani, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al., (2021) menghasilkan PDRB Per kapita memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2019. Penelitian lain yang dilakukan Sinaga et al., (2023) menghasilkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias tahun 2018-2022.

Pengangguran juga merupakan masalah ketenagakerjaan yang jika dibiarkan akan menjadi menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Pengangguran adalah kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan dan atau sedang aktif mencari kerja (Purnamawati & Yuniarta, 2023: 101). Pada teori klasik pengangguran terjadi karena mekanisme pasar, jika upah mengalami penurunan maka jumlah pengangguran akan meningkat dan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengangguran dapat memiliki hubungan dengan kemiskinan. Seseorang dalam kondisi menganggur akan kehilangan pendapatan utama dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kondisi tersebut terjadi secara jangka panjang maka akan meningkatkan potensi kemiskinan.



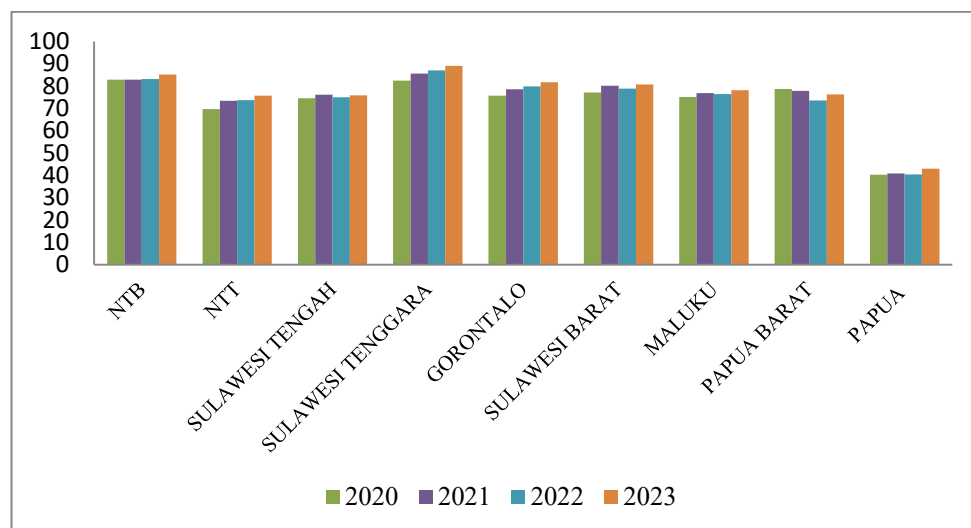
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka 9 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2023 (Persen)

Dari gambar 1.5 menunjukkan adanya fluktuasi angka pengangguran sejak empat tahun terakhir di sembilan provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Provinsi Maluku yang mencapai 6,08% pada tahun 2023. Sedangkan Tingkat pengangguran terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat yaitu 3,04% pada tahun 2023. Hubungan pengangguran dan kemiskinan dapat dikuatkan dengan hasil penelitian oleh Andrean et al., (2023) menghasilkan pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara.

Kemiskinan juga bersifat multidimensional, dapat menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya beragam. Perbaikan akses konsumsi pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang layak menjadi alat kebijakan yang penting dalam strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 2004: 243). Pelayanan pokok tersebut dapat meliputi akses pendidikan, akses fasilitas kesehatan, air bersih, akses sanitasi yang layak, tempat pembuangan sampah, dan perumahan. Akses sanitasi layak merupakan fasilitas dasar yang perlu dipenuhi oleh manusia. Berdasarkan teori *human capital*, Akses sanitasi layak dapat mendukung peningkatan akses kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan potensi pendapatan di masa depan. Infrastruktur air dan sanitasi dapat membantu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan produktivitas dan pendapatan (L. Zhang et al., 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1. 6 Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak di 9 Provinsi Kawasan Timur Indonesia Tahun 2020-2023 (Persen)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak terus mengalami peningkatan sejak 2020-2023. Namun, Provinsi Papua merupakan provinsi yang paling memiliki

jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak terendah di Indonesia. Pada tahun 2023 akses sanitasi layak di Papua hanya pada 43% dari total jumlah rumah tangga. Sedangkan pada sembilan provinsi KTI tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi provinsi yang memiliki persentase akses sanitasi yang tertinggi yaitu 88,99%. Sehingga pada gambar 1.6 terlihat kesenjangan grafik Provinsi Papua dengan Provinsi lainnya. Penelitian Adhitya et al., (2022) menghasilkan jika akses sanitasi memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2020. Berbeda dengan penelitian oleh Fitriana & Gravitiani (2022) menghasilkan jika akses sanitasi layak memiliki hubungan negatif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di lima kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2020.

Dalam mencapai tujuan nasional yang adil dan merata, maka permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah yang perlu dikaji dan diupayakan penanggulangannya. Pendapatan perkapita yang mengalami peningkatan namun kemiskinan masih menunjukkan angka yang tinggi menunjukkan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena berbagai faktor selain faktor ekonomi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang mempengaruhi kemiskinan meliputi faktor ekonomi, tenaga kerja, akses layanan dasar dan kesehatan di sembilan provinsi di Kawasan Timur Indonesia dengan judul penelitian **“Pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Akses Sanitasi Layak terhadap Tingkat Kemiskinan di Sembilan Provinsi Kawasan Timur Indonesia Tahun 2018-2023”**. Sembilan provinsi dipilih menjadi lokasi penelitian karena merupakan provinsi di Kawasan

Timur yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan berada di atas tingkat kemiskinan nasional sejak tahun 2018-2023. Sembilan provinsi tersebut diantaranya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah menambahkan variabel baru yaitu akses sanitasi layak, dan memiliki kebaruan dalam interaksi antara variabel yang mewakili ekonomi, tenaga kerja, akses layanan dasar dan kesehatan, penelitian ini juga memperbarui periode waktu yang diteliti. Terdapat celah penelitian dalam melihat pengaruh akses sanitasi layak terhadap tingkat kemiskinan. Beberapa penelitian menemukan hasil yang signifikan, sementara di penelitian lainnya tidak menemukan pengaruh yang sama.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Akses Sanitasi Layak terhadap Tingkat Kemiskinan secara parsial di sembilan provinsi Kawasan Timur Indonesia tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Akses Sanitasi Layak terhadap Tingkat Kemiskinan secara bersama-sama di sembilan provinsi Kawasan Timur Indonesia tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Akses Sanitasi Layak terhadap Tingkat Kemiskinan secara parsial di sembilan provinsi Kawasan Timur Indonesia tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Akses Sanitasi Layak terhadap Tingkat Kemiskinan secara bersama-sama di sembilan provinsi Kawasan Timur Indonesia tahun 2018-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Akses Sanitasi Layak terhadap Tingkat Kemiskinan di sembilan provinsi Kawasan Timur Indonesia tahun 2018-2023.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi bagi pemegang kebijakan khususnya pemerintah terkait dalam pembuatan kebijakan atau pembangunan yang lebih baik dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang serupa.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di sembilan provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia. Sembilan provinsi tersebut diantaranya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Peneliti melakukan penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan data PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Akses Sanitasi Layak, dan Tingkat Kemiskinan melalui *website* resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dimulai dari pengajuan outline penelitian dan penyerahan SK bimbingan kepada Dosen Pembimbing, yang kemudian dilanjutkan dengan proses konsultasi dan bimbingan. Adapun jadwal penelitian ini seperti tercantum pada:

